

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dapat dikatakan merupakan salah satu negara yang secara geografis terletak di wilayah yang sangat strategis karena berada di posisi silang, yaitu terletak diantara 2 benua dan 2 samudra. Selain itu, Indonesia juga merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang dominan daripada daratan, keunikan Indonesia ini dapat menjadi potensi tersendiri bagi bangsa terutama wilayah perairan, Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa laut memiliki peran penting dalam kemajuan negeri, baik dalam menunjang aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, kondisi geografis Indonesia selain memiliki kelebihan jika tidak dijaga dengan baik tentu akan mendatangkan ancaman bagi stabilitas nasional, ancaman tersebut dapat berupa ketegangan dengan negara terdekat hingga masuknya ancaman non- tradisional seperti perdagangan ilegal, terorisme serta penyelundupan narkoba dan lain-lain. Hal ini patut menjadi perhatian, sehingga sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan kapabilitas pertahanan dalam sektor laut.

Didasari pada timbulnya kesadaran akan hal tersebut, pemerintah sedang gencarnya melaksanakan penegakan kedaulatan laut wilayah NKRI, melaksanakan revitalisasi berbagai sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, melakukan konservasi biodiversity serta melaksanakan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan itu adalah berbagai program utama di era pemerintahan Presiden Jokowi dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Kominfo, 2016). Jokowi memiliki impian besar untuk menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai tempat aktivitas laut yang paling aman di dunia sehingga pemerintah akan menjamin keamanan dan keselamatan

transportasi laut yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Keinginan besar Presiden Jokowi menjadi tugas besar para kabinet di bawah naungandalam forum internasional yaitu KTT ASEAN, KTT APEC dan G-20 menteri luar negeri Indonesia telah mencoba untuk mempromosikan konsep Poros Maritim Dunia kepada negara-negara asing dengan mengatakan bahwa Indonesia telah siap menjadi negara maritim yang kuat.

Untuk mencapai cita-cita negara untuk menjadi negara maritim yang kuat bukan hanya saja perlu pembangunan pada badan TNI serta infrastruktur tetapi pada bidang keamanan serta pertahanan juga harus diperhatikan mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki laut terbesar di dunia, wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau serta laut yang secara langsung berbatasan dengan wilayah Negara lain. Sebagai negara yang memiliki kondisi geografi yang luas dan terdiri atas ribuan pulau dengan wilayah perairan yang luas dan terbuka, Indonesia sangat rawan terhadap beragam bentuk ancaman baik militer maupun nir-militer yang dapat mengganggu ketahanan maritim.

Sehingga tidak mengejutkan bahwa Indonesia menghadapi banyak ancaman terutama dalam sektor geografi, banyaknya pelanggaran serta pengklaiman yang dilakukan oleh Negara lain terhadap Indonesia selain harus ditanggapi juga harus dapat di cegah. Semakin banyak munculnya ancaman pada kawasan regional, ditandai dengan pengklaimaan wilayah kedaulatan Indonesia, salah satunya pengkalaiman perairan Natuna oleh China karena wilayah tersebut bertumpang tindih dengan Laut China Selatan.

Selain itu, ancaman lainnya adalah pembajakan di selat-selat sekitar Indonesia yang harus diproteksi lebih baik oleh pemerintah sebab pembajakan atau perampokan oleh sekelompok penjahat transnasional sangat merugikan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Sejak 2012, Indonesia merupakan Negara paling rawan pembajakan di dunia menurut laporan Biro Maritim Internasional pada 2017. Sekitar 43 peristiwa kekerasan di laut dilaporkan pada 2017. Ini termasuk satu pembajakan, lima percobaan serangan, dan 33 insiden di dermaga atau ketika perahu sedang lempar jangkar. Dapat kita lihat bahwa betapa

seriusnya ancaman yang dihadapi oleh Indonesia, maka dari itu dibutuhkan mitigasi yang tepat untuk mengatasi isu pembajakan dan isu-isu lainnya yang menyangkut dengan ketahanan maritim Indonesia. Wilayah perairan Indonesia adalah target utama dari berbagai bentuk ancaman maupun tantangan sehingga Indonesia perlu menjaga kedaulatan serta aset yang ada di teritorial perairan Indonesia ditambah lagi jika dilihat dari jumlah penduduk, dan luas wilayah darat serta perairannya, Indonesia dapat disebut sebagai bangsa yang besar, namun begitu kondisi kekuatan maritim Indonesia tidak seimbang dengan jumlah maupun jenis alutsista (alat utama sistem senjata) yang dimiliki oleh Indonesia untuk melaksanakan keamanan maritim. Tidak lebih kurang dari 5,8 juta km² luas laut dan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km tentunya membutuhkan dukungan alutsista yang besar dan mampu menjaga seluruh kedaulatan perairan yang luas tersebut. Hal ini menciptakan pemikiran bahwa diperlukannya sebuah rancangan pengembangan alutsista untuk mengatasi situasi dan perubahan ancaman serta perang non konvensional yang melibatkan aktor non negara.

Saat ini kekuatan alutsista yang dimiliki TNI masih terbilang kurang maksimal dan belum mampu untuk memadai kebutuhan TNI AL maupun TNI AU dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Faktor-faktor dari hal tersebut adalah karena masalah usia peralatan serta kurangnya anggaran untuk pengadaan alutsista maupun komponen dan suku cadangnya terutama sebelum pemerintahan era Jokowi, sebelumnya Presiden Jokowi menjabat anggaran pertahanan Indonesia berada dibawah 100 triliun lebih tepatnya yaitu sebesar Rp 86,4 triliun pada tahun 2014. Dan lalu mengalami peningkatan hingga tahun 2019 hampir setiap tahunnya kecuali pada tahun 2018, tercatat turun sekitar 10,3persen dari tahun sebelumnya dari Rp 114,9 triliun menjadi Rp107,6 triliun dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 sebanyak 0,74 persen, menjadi Rp108,4 triliun (Beritagar, 2019).

Maka dari itu, hanya beberapa alutsista yang siap untuk digunakan maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban untuk menambah dan meremajakan

alutsista, terutama alutsista cacat ataupun usang yang malah dapat membahayakan keselamatan prajurit dan pada akhirnya dapat berakibat ancaman pada kedaulatan bangsa. Namun tantangan dari usaha Indonesia tersebut adalah masalah anggaran, tentunya penambahan maupun peremajaan alutsista TNI tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan mengingat anggaran yang dimiliki negara untuk memenuhi tujuan tersebut masih kurang.

Keterbatasan anggaran pertahanan tersebut disikapi oleh Kementerian Pertahanan dan TNI dengan merencanakan pembangunan kekuatan pertahanan secara minimal melalui program Minimum Essential Forces. Minimum Essential Forces atau yang dikenal dengan istilah MEF merupakan proses untuk memodernisasi alutsista Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2009. Adanya MEF (*Minimum Essential Force*) menjadikan sebuah struktur kekuatan dari pertahanan suatu negara yang berada di level yang mencukupi untuk mencapai kepentingan nasional dan objek-objek dari pertahanan-keamanan. MEF tidaklah diciptakan menurut konsep perlombaan senjata yang bertujuan untuk unggul dalam perang total, namun MEF merupakan strategi pengembangan kekuatan Komponen Utama menuju ideal, tujuan utamanya adalah untuk mempunyai efek daya tangkal dan memiliki bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar. Penyelarasan MEF akan memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF, yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Dengan menggunakan prinsip *right sizing* dan *zero growth policy* ditambah dengan melakukan pertimbangan aspek organisasi, pemerintah mengharapkan strategi tersebut dapat membantu kebijakan pengembangan personal TNI.

Untuk membentuk suatu komposisi personel TNI yang handal dan kuat, prinsip-prinsip tersebut di gunakan untuk meningkatkan profesionalitas TNI (Kementerian Pertahanan, 2012: 5). Dalam membangun postur pertahanan militer diperlukan pengintegrasian antara pembangunan postur pertahanan militer dan

pembangunan postur pertahanan non militer. Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengatakan bahwa: (Ryamizard Ryacudu, 2018)

“Pembangunan postur pertahanan negara merupakan komponen integral dari pembangunan nasional yang sinergis dan searah dengan pembangunan bidang lainnya, demi terwujudnya pencapaian Visi, Misi dan Nawacita pemerintah dalam tatanan pembangunan nasional”

Realisasi pengembangan postur pertahanan nasional ditetapkan oleh tanggung jawab pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai serta menetapkan skema anggaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada 2005-2025. Pengembangan postur pertahanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan penyebaran pertahanan militer dan pertahanan non-militer yang memiliki kemampuan pertahanan nasional yang andal dan membantu terlaksananya Poros Maritim Dunia. (Kemhan, 2018)

Program MEF tidak hanya mengembangkan alutsista melalui pengadaan alutsista saja namun juga mengembangkan industri pertahanan yang mampu mendukung alutsista tersebut dalam hal ketersediaan suku cadang secara mandiri, pengembangan teknologi maupun pembangunan alutsista secara mandiri (UU Industri Pertahanan, 2012). Dalam konteks hubungan internasional, dinamika yang terjadi terhadap sistem internasional dapat dipengaruhi oleh industri pertahanan suatu negara. Sebab pengembangan industri pertahanan dapat diartikan sebagai suatu upaya sebuah negara untuk meningkatkan kapabilitas militer negara tersebut. Maka dari itu, pengembangan pengadaan alutsista berpotensi memiliki pengaruh sangat besar dalam kepentingan politik regional sebab peningkatan industri pertahanan, baik dalam mendukung kebutuhan angkatan bersenjata ataupun hanya terfokus pada bidang ekonomi, akan menjadi perhatian bagi negara lain. Dalam menangani kasus dan negosiasi internasional keadaan industri pertahanan di suatu negara dapat menjadikan sebuah nilai tawar

bagi negara lain. Sebagai upaya dalam menstimulasi perkembangan industri pertahanan domestik dan meringankan beban devisa serta dampak pada neraca pembayaran. Inovasi pengadaan alutsista domestik penting dilakukan.

Salah satu strategi Indonesia dalam melakukan modernisasi alutsista adalah dengan bekerjasama dengan beberapa negara dibidang pertahanan, karena kerjasama pertahanan merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk menutupi kekurangan anggaran seperti contohnya Indonesia. Dalam pemenuhan kebutuhan dan perawatan serta kebutuhan segala suku cadang alutsista, Indonesia masih banyak bergantung kepada negara lain. Fakta yang harus diterima Indonesia adalah alutsista Indonesia dapat terbilang tertinggal dari negara-negara lain. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang dipelopori Indonesia agar negara tidak jauh semakin tertinggal. Dengan teknologi dan pola hubungan antar negara kerjasama tidak dapat dihindarkan, kerjasama yang dilaksanakan oleh dua negara atau lebih tidak lain merupakan karena negara- negara tersebut memiliki tujuan yang sama.

Salah satu negara yang bersedia untuk melakukan kerjasama pertahanan melalui *transfer of technology* ke Indonesia adalah Korea Selatan. Indonesia dengan Korea Selatan memiliki hubungan yang cukup erat pasalnya bukan hanya saja mereka melakukan kesepakatan dibidang ekonomi, budaya dan politik tetapi dalam bidang industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan juga telah memiliki hasil diplomasi yang baik. Maka dari itu kedua pihak, Indonesia serta Korea Selatan sebelum kerjasama ini dibentuk telah menaruh kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Lalu hal tersebut semakin dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperatiion in the 21st Century* pada 2006, dan intensitas kunjungan yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Korea Selatan, hal tersebut merupakan bukti keharmonisan dan kedekatan hubungan Indonesia dan Korea Selatan meskipun telah terjadi pergantian kepemimpinan pada kedua

negara.

Kerjasama yang sudah terjalin kedua negara akan dengan mudah masing-masing negara untuk mempercayai proyek pembangunan industri pertahanan, selain itu Korea Selatan merupakan satu-satunya Negara yang bersedia untuk melakukan transfer teknologi kepada Indonesia. Tidak hanya itu, para ilmuwan serta teknisi Indonesia juga diterbangkan ke Korea Selatan untuk mempelajari serta membangun alutsista untuk Indonesia sendiri yang akan berguna bagi Indonesia kelak. Sehingga Korea Selatan merupakan negara yang berperan penting dalam pembangunan industri pertahanan Indonesia yang akan menghasilkan alutsista yang berguna bagi keamanan serta ketahanan Indonesia.

Keakraban yang tinggi dalam bidang pertahanan semakin ditunjukkan oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana Indonesia mempercayai proyek kerjasama dua dari tujuh program strategis pengembangan industri pertahanan Indonesia kepada Korea Selatan. (I Wayan Sulpai, Skripsi 2019: 82). Program tersebut merupakan kerjasama dalam bidang industri pertahanan yang dilakukan Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur yang dibuktikan dengan kesepakatan *Letter of Intent on Co-Development of a Fighter Jet Project between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Defense Acquisition Program Administration of the Republic of Korea* pada tahun 2009, ditambah kerjasama pembelian yang dibarengi dengan co-production pada bidang maritim yang fokus pada sektor kapal selam jenis Changbogo yaitu KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404 dan Alugoro-405 yang baru saja dirilis tahun ini. Sampai saat ini Indonesia adalah salah satu importir terbesar peralatan pertahanan Korea Selatan, dan kerja sama antar kedua negara dalam proyek-proyek terus berlanjut ke berbagai tingkatan, mulai dari kapal selam, kapal perang hingga pengembangan pesawat tempur KF-X / IF-X baru yang telah mengalami beberapa komplikasi (Jakarta Greater, 2018).

Pengadaan alutsista terutama dalam bidang maritim melalui kerjasama Indonesia-Korea Selatan telah memberikan dampak kemajuan pertahanan maritim Indonesia, dengan adanya penambahan kapal selam serta pesawat tempur yang diusung oleh kedua negara cita-cita untuk memodernisasi kan alutsista Indonesia sedikit demi sedikit akan terealisasi. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan tidak lain dikarenakan latar belakang bahwa Indonesia menginginkan pemenuhan target MEF (*Minimum Essential Force*) untuk memiliki 12 unit kapal selam. Dengan adanya alutsista canggih yang dimiliki oleh Indonesia akan terwujud peningkatan pertahanan maritim Indonesia sebab setiap alutsista yang telah diproduksi oleh Indonesia dengan kolaborasi Korea Selatan akan sangat bermanfaat bagi Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga serta mencegah lawan untuk memasuki kawasan teritorial Indonesia dengan memberikan efek penggentar.

Alutsista-alutsista tersebut nantinya akan digunakan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang datang kepada Indonesia sebab seperti yang telah diketahui bahwa ancaman yang harus selalu diperhatikan oleh Indonesia akhir-akhir ini datang dari negara-negara tetangga yang seenaknya mengklaim maupun memasuki zona teritorial perairan Indonesia tanpa izin. Sehingga perlu diketahui bahwa satuan kapal selam tersebut mampu menjaga pulau-pulau atau garis laut terluar Indonesia, sedangkan pesawat tempur akan digunakan untuk memantau kondisi perairan Indonesia dilihat dari udara yang tidak dapat dijangkau oleh mata. Selanjutnya melalui program ini Indonesia juga diharapkan akan dapat memproduksi alutsista dalam negeri dengan anggaran sesuai *budget* yang tidak kalah canggih dengan kemampuan alutsista negara-negara Barat, dengan alutsista yang mumpuni tentu hal tersebut dapat memaksimalkan kekuatan maritim Indonesia.

Hubungan kerjasama kedua Negara tersebut diharapkan akan terus memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pertahanan maritim Indonesia serta diharapkan dapat terjalin dengan semakin erat mengingat bahwa

Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai industri pertahanan khususnya dalam bidang kapal selam termaju di dunia (Multazam, Tesis 2010: 26).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan implikasi dari kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan yang telah menghasilkan beberapa alutsista. Seperti yang telah dijelaskan bahwa berbagai alutsista tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan kewajiban Angkatan Laut Indonesia untuk menjaga serta memelihara wilayah maritim Indonesia yang akan berimbas kepada peningkatan pertahanan maritim Indonesia seperti yang telah dicita-citakan oleh Indonesia untuk menjadi negara *Sea Power* yang artinya memiliki kekuatan laut yang luar biasa agar dapat mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Kesadaran akan pembangunan ketahanan maritim telah dilaksanakan oleh Indonesia melalui kebijakan MEF, Indonesia telah membuat banyak kesepakatan dengan beberapa negara salah satunya Korea Selatan. Dalam penandatanganan *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* pada 2006, Korea Selatan dan Indonesia telah bersepakat untuk menjadi mitra dalam bidang industri pertahanan untuk menghasilkan beberapa bentuk alutsista yaitu, kapal selam dan pesawat udara. Alutsista tersebut diharapkan akan mampu mendukung pertahanan maritim Indonesia maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: **“Bagaimana Implikasi Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan Dalam Upaya Meningkatkan Pertahanan Maritim Indonesia?”**

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis akan membahas implikasi kerjasama industri pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya

meningkatkan pertahanan maritim Indonesia pada periode 2016-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

- a. Memberikan pemahaman mengenai kerjasama industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan
- b. Mengetahui seberapa besar pengaruh kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat - manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, penulis dapat menambah serta memperdalam wawasan dan penulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Sarjana Satu pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran “Jakarta”

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan dalam mempelajari lebih jauh hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan pada penelitian dimasa yang akan datang, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti.

- b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam upaya meningkatkan pertahanan maritim Indonesia

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab tujuannya agar pembaca dapat memahami alur pemikiran penulisan ini. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian kedalam IV bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan *literature review* yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian – penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, menjelaskan teori dan konsep yang penulis gunakan sebagai landasan dari penelitian ini, lalu alur pemikiran dan yang terakhir hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab III berisikan metode penelitian yang akan memiliki beberapa sub bab yang akan membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV IMPLIKASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERTAHANAN MARITIM INDONESIA

Bab IV berisikan pembahasan dimana penulis akan menjelaskan seluruh data yang telah dikumpulkan dan menganalisis hasil data.

Pertama penulis akan membahas tentang industri pertahanan Korea Selatan dengan industri pertahanan Indonesia dengan perkembangannya, lalu dilanjutkan dengan kerjasama kedua Negara hingga hasil kerjasama yang berimplikasi pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.

Bab V PENUTUP

Bab V berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian beserta saran.